

Jumat (14/3), menjelang moment kampanye terbuka, bertempat di Aula Youth Centre, Jl. Mgr. Van Bekum, Labuan Bajo, diadakan dialog lintas partai politik yang dilaksanakan oleh alumni Sekolah Demokrasi Manggarai Barat Angkatan I. Dihadiri oleh semua parpol peserta Pemilu, acara juga menghadirkan empat orang pembanding yakni 1) Dr. Ignas Kleden (Ketua Badan Pengurus Komunitas Indonesia untuk Demokrasi), 2) Sujanarko, Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 3) Dr. Phil. Norbetus Jegalus, MA (Dosen Fakultas Filsafat UNWIRA Kupang), dan 4) Aventinus Jesman, SH (Ketua KPU Jabar).

Dimulai pukul 15.30 wita dibuka dengan doa oleh Romo Paroki, acara dipandu dua orang moderator yakni Romo Leo dan Hipol Mawar. Alur acara diawali dengan pemaparan visi, misi, dan program partai dalam konteks Kabupaten Manggarai Barat. Partai rata-rata diwakili oleh dua sampai tiga kader mereka dan satu partai yang hanya diwakili satu orang (PKPI). Patut diapresiasi, bahwa dari seluruh peserta, 7 orang merupakan alumni Sekolah Demokrasi Jabar. Mereka berfungsi cukup baik sebagai juru bicara partai. Dari pandangan peserta nampak mereka belum cukup solid dalam menilai masalah utama di Jabar, namun secara umum mereka melakukan kritik terhadap pelaksanaan kebijakan oleh eksekutif dan otokritik terhadap kondisi internal partai.

Romo Leo di awal menyampaikan pertanyaan kunci bahwa Labuan Bajo telah berkembang menjadi kota internasional sehingga para caleg harus bergerak cepat. Tanggapan beragam pun muncul dari peserta yang juga merupakan calon legislative. Catatan penting yang disampaikan masing-masing peserta (berdasarkan asal partai) antara lain sebagai berikut :

Partai

Masalah Jabar

Masalah Partai

Nasdem

Bersama dengan pemerintah untuk kesejahteraan rakyat dalam bidang infrastruktur dan ekonomi. R

Kunci perubahan lewat parpol.

PKB

Focus pada Pemilu yang berkualitas dengan ukuran kualitas calegnya.

Caleg harus berkualitas.

PDIP

Diperlukan reformasi birokrasi,

CSO dan NGO didorong berani berkata tidak untuk hal-hal yang tidak baik.

Politik anggaran harus direformasi.

Praktek politik uang yang terjadi di Jabar yakni lewat koperasi di mana warga ditarik uang.

Anggota dewan dimulai dengan calon yang berpihak ke rakyat.

Golkar

Infrastruktur seperti jalan, air minum, sarana kesehatan perlu diperbaiki

Perlu alokasi anggaran pertanian dan koperasi

Pemberdayaan politik untuk masyarakat sepanjang waktu.

Caleg harus berjuang dan bekerja bersama rakyat Mabar.

Gerindra

Masalah kesehatan mengenai angka kematian ibu dan anak, paramedic, alkes, alokasi tenaga medi

Anggaran bidang politik focus pada pemberdayaan manusia

Bahwa keadilan social sama dengan keadilan gender. Jika di Mabar semakin banyak perempuan be

Demokrat

(membacakan materi yang dibagikan mengenai profil sebagai caleg).

PAN

LBJ harus berkelas internasional dalam bidang pertanian, kesehatan, perkebunan, dan wisata

Rakyat Mabar harus jadi tuan rumah di negeri sendiri.

Anggota dewan adalah penyambung aspirasi rakyat

Harus berpegang pada filosofi demokrasi Mabar.

PPP

Membentuk Mabar sebagai katalisator dan mendukung masyarakat kompetitif dan mandiri pada prinsip

Anggota dewan harus punya kemampuan soal infrastruktur dan kapasitas fungsi dewan.

PKPI

Prihatin dengan isu kematian ibu dan anak karena fasilitas tidak mendukung, jalan raya tidak mema

Posisi perempuan sering didiskriminasi terutama dalam adat Mabar

Kesadaran gender perlu ditingkatkan.

Dr. Phil. Norbetus Jegalus, MA (Dosen Fakultas Filsafat UNWIRA Kupang) sebagai pembanding mencatat bahwa pengetahuan terhadap fungsi dewan saja tidak cukup karena demokrasi tidak identik dengan pemilu karena harus didukung juga oleh CSO dan media. Pembanding dari KID, Dr. Ignas Kleden, menilai penyerapan aspirasi harus diperjuangkan menjadi program politik. Partai yang ada saat ini adalah partai elektoral, bukan partai politik. Labuan Bajo sebagai tujuan wisata harus difokuskan pada turisme yang harus menjadi masukan untuk kesejahteraan, kesempatan, dan nilai yang baik bagi masyarakatnya. Dan bahwa fungsi dewan hanya satu yakni representasi untuk tiga bidang tugas (legislasi, anggaran, pengawasan).

Sementara sebagai penyelenggara Pemilu, Aventinus Jesman, SH yang menjabat Ketua KPU Mabar, menanyakan apa definisi konstitusional tentang Pemilu dan pemilihan harus menjadi subyek utama. Pembanding keempat, Sujanarko dari KPK mendorong untuk memilih anggota dewan yang mendukung peningkatan PAD, fungsi dewan dalam UU MD3 perlu diperbaiki. Anggota dewan harus punya pilihan strategis terkait konsep representasi. Anggota dewan harus memiliki pemahaman soal anggaran dalam konteks otonomi daerah. Pak Koko

(panggilan akrab Sujanarko) menyatakan bahwa demokrasi hubungannya sangat erat dengan pemberantasan korupsi karena sumber dari sumber korupsi berasal dari parpol. Di akhir pernyataan, Pak Koko menilai bahwa pejabat yang direkrut harus kredibel, parpol harus diperkuat, jika dialog serupa sering dilakukan maka konflik Mabar bisa diminimalisir. Masalah gender yang dibahas, menurut Pak Koko, sudah diangkat dengan baik. (EK)

{gallery}dppsdmb14{/gallery}